

PAPER BRIEF

---

**PEMBANGUNAN  
KEBUDAYAAN (I):  
MENCERMATI  
PENGELOLAAN  
ANGGARAN  
KEMENDIKBUD DAN  
PAREKRAF**

---

---

---

# PENDAHULUAN

---

**S**ektor kebudayaan sebagai kesatuan kerangka pembangunan nasional hingga sampai saat ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal kebijakan dan infrastruktur.

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh masyarakat yang berbentuk organisasi maupun komunitas adat masih menyisakan masalah di lapangan seperti kesulitan mengakses fasilitas, regulasi dan perlindungan hukum,<sup>1)</sup> serta siasat keberlangsungan organisasi melalui swasembada pribadi. Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa lingkungan infrastruktur di bidang seni budaya belum optimal dan belum mewadahi besar potensi keseniannya.

Seni budaya tidak lepas dari sistem regulasi negara, yakni kementerian. Tugas kementerian secara umum adalah membidani bidang-bidang tertentu dengan mencanangkan visi dan misi demi tercapainya pembangunan bidang yang merata. Di bidang seni budaya, kementerian yang mengemban tugas tersebut jatuh kepada **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)** dan **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)**. Secara garis besar, kedua kementerian tersebut berlaku sebagai lembaga induk pengelola dan pembuat kebijakan kebudayaan di Indonesia.

---

**1)** Hambatan penyelenggaraan kesenian dalam “Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan” oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009, hal. 33-35

Salah satu instrumen penting untuk melihat strategi dan arah pengembangan seni budaya Kemendikbud dan Parekraf adalah pembacaan anggaran di kedua kementerian. Menurut Glenn A Welsch (2000), anggaran berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan suatu unit organisasi. Anggaran dipakai sebagai sumber daya dalam pelaksanaan aktivitas dan rencana kerja yang telah ditetapkan selama periode setahun. Dengan kata lain, anggaran suatu kementerian berlaku sebagai proyeksi tata pemerintahan atas pelayanannya kepada masyarakat luas. Pengkajian anggaran Kemendikbud dan Parekraf pun dapat menggambarkan kerangka, peruntukkan, falsafah manajemen, dan landasan operasional program-program kerja tahunan yang berhubungan dengan tujuan strategis di kedua kementerian tersebut.

Penelitian ini mengambil studi kasus APBN Kementerian/Lembaga antara tahun 2012-2013 dari Kemendikbud dan Parekraf. Pemilihan periode dua tahun terakhir tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan struktur kementerian atas hasil *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 18 Oktober 2011, yang berujung pada pembentukan strategi dan arah kebijakan di bidang seni budaya hingga sekarang. Kementerian Pendidikan Nasional berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Budaya dan Pariwisata berubah nama menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui perubahan tersebut, terjadi perpindahan mendasar atas fungsi, tugas, dan kebijakan induk pada masing-masing kementerian, tak terkecuali alokasi anggaran.

---

**SECARA KHUSUS, PENELITIAN INI AKAN MEMAPARKAN DUA HAL. PERTAMA, MENGGAMBARAKAN DAYA KAPITAL (BUDGET ESTIMATES) KEMENDIKBUD DAN PAREKRAF UNTUK PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN KEDUA, MENCERMATI KINERJA KEMENDIKBUD DAN PAREKRAF MELALUI INSTRUMEN ANGGARAN DALAM DUA TAHUN TERAKHIR.**

---

Data yang dipakai berasal dari DIPA K/L (Daftar Isian Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di tahun yang bersangkutan.

Paper “Pembangunan Kebudayaan: Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf” merupakan wacana pembuka dari rangkaian penelitian Koalisi Seni Indonesia mengenai kajian anggaran dengan tujuan melihat orientasi kebijakan kebudayaan nasional. Diharapkan paper ini dapat digunakan sebagai alat pemantau kinerja pemerintah dan mendorong perbaikan pengelolaan anggaran dan kebijakan di sektor seni budaya.

---

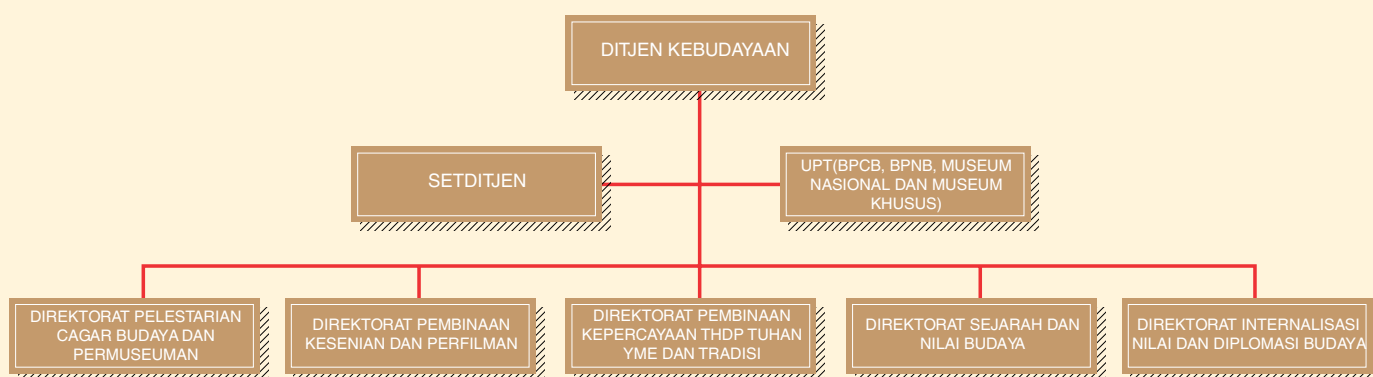
# FASE TRANSISI DAN MANAJEMEN BIROKRASI



**N**omenklatur Kemendikbud dan Parekras dicatat dalam PerPres No. 92/2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara. Perubahan dalam struktur Kemendikbud terletak pada kehadiran dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Wakil Menteri Kebudayaan (Pasal 433A), serta pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan di tataran Eselon I (Pasal 436). Sementara Parekras menambah dua pejabat Eselon I setingkat Direktorat Jenderal, yakni Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya yang menggantikan Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, serta Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menggantikan Ditjen Sejarah dan Purbakala (Pasal 500).

Setelah peresmian nomenklatur pada 21 Desember 2011, APBN K/L 2012 Kemendikbud dan Parekras yang diatur dalam UU No. 22/2011 turut mengalami penyesuaian. Hal tersebut jatuh pada alokasi anggaran yang akan diberlakukan setelah pembentukan struktur organisasi baru dan konsolidasi laporan keuangan antar dua kementerian.

Perubahan tataran Eselon I dengan satu Ditjen baru di Kemendikbud dan dua Ditjen baru di Parekraf menimbulkan permasalahan administrasi dan pembagian birokrasi. Pengembangan sektor kebudayaan yang dahulu dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata—kini diganti menjadi Parekraf—berpindah ke Kemendikbud. Salah satu contohnya adalah pengelolaan cagar budaya, museum, dan warisan budaya lain—yang merupakan aset tetap negara—berpindah menjadi di bawah kewenangan Kemendikbud. Ditjen Sejarah dan Purbakala di Parekraf kemudian dihilangkan dan diganti dengan pembentukan direktorat-direktorat bersifat sejenis di Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, antara lain Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya dan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.



Bagan - Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud

Masa transisi ini memakan waktu yang tidak sedikit dan menimbulkan permasalahan mendasar.

---

**BERDASARKAN LK BPK 2012 TERDAPAT KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SEPERTI TIDAK TERTIBNYA PENCATATAN DAN PELAPORAN ASET, SERTA TERBENGGALAINYA INVENTARISASI FISIK (*STOCK OPNAME*) SEJUMLAH SATKER DI DIREKTORAT LAMA HINGGA AKHIR TAHUN.**

---

Hal ini kemudian berdampak pada alokasi anggaran untuk masing-masing direktorat baru yang bertumpu pada pencairan APBN-P (APBN-Perubahan) 2012.

Selama masa inventarisasi tersebut, terjadi kebijakan konsolidasi laporan keuangan antar Kemendikbud dan Parekraf. Konsolidasi tersebut jatuh pada satker Ditjen Kebudayaan yang pada APBN K/L 2012 berada di laporan keuangan Parekraf dan pada APBN-P 2012 berada di laporan keuangan Kemendikbud.



Pemindahan satker Ditjen Kebudayaan yang dilaporkan dalam neraca sistem akuntansi Parekraf ke neraca sistem akuntansi Kemendikbud diharapkan dilakukan pada tahun 2013. Dengan kata lain, pelaksanaan satker Ditjen Kebudayaan dengan sejumlah direktoratnya hingga kuartal terakhir 2012 masih memakai “kertas kerja” DIPA Parekraf, yang kemudian baru mulai berjalan mandiri di bawah kewenangan Kemendikbud setelah realisasi APBN-P.

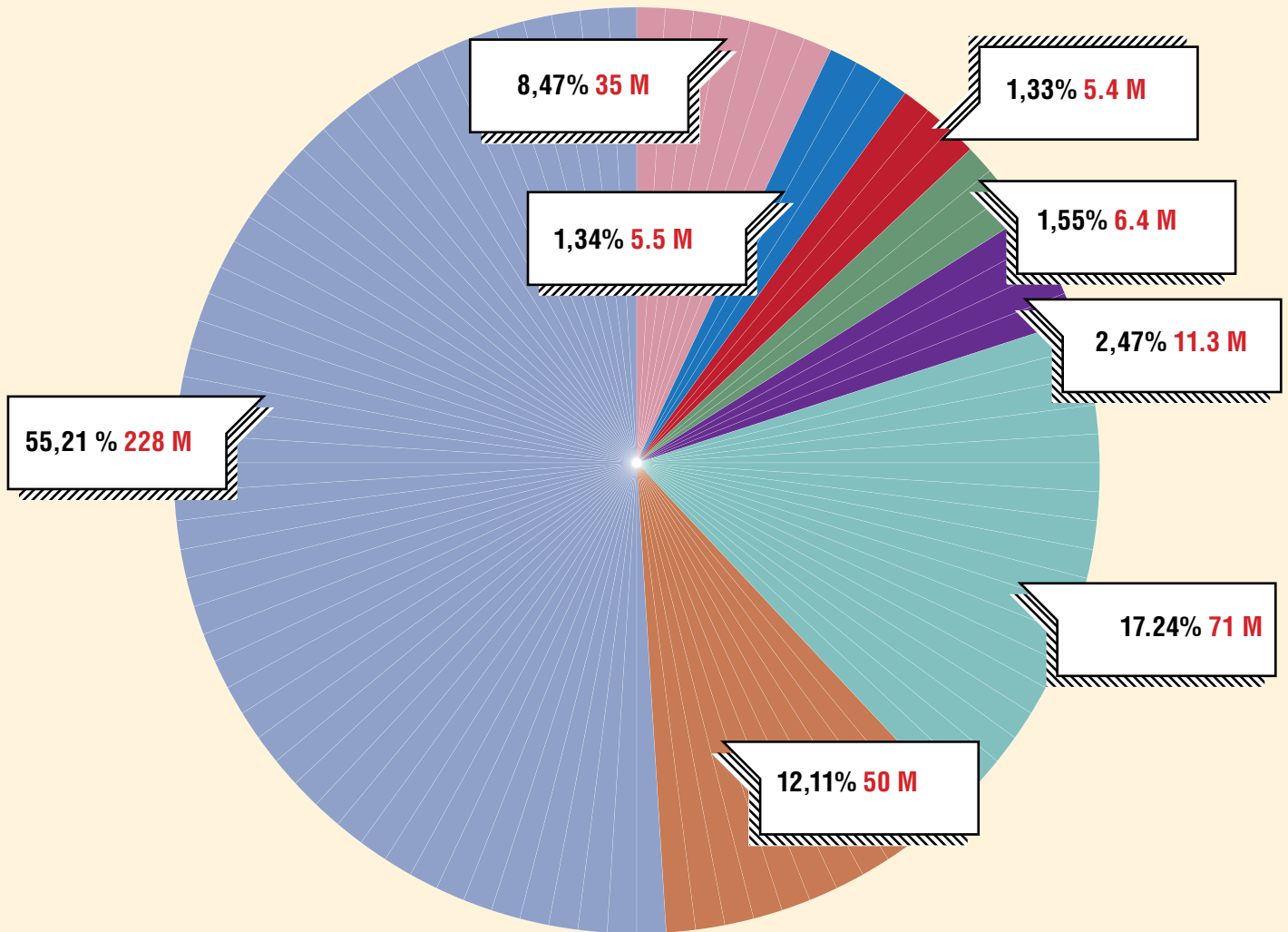
---

**SECARA GARIS BESAR, SEPANJANG 2012 PENYELENGGARAAN SEKTOR KEBUDAYAAN TERARAH KE DALAM DIPA PAREKRAF YANG DIWAKILI OLEH DITJEN NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM (43 SATKER), DITJEN SEJARAH DAN PURBAKALA (33 SATKER), DAN DITJEN PEMASARAN (34 SATKER).**

---

Penjumlahan satker tersebut berkapasitas anggaran 845 M dengan perbandingan program Kesenjaraan, Purbakala, dan Permuseuman (48%), Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman (37%), Ditjen Pemasaran khusus ajang promosi budaya (6%), serta Penelitian dan Pengembangan Arkeologi dan Kebudayaan (8%).

# FASE TRANSISI DAN MANAJEMEN BIROKRASI



- 55,21% 228M Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala
  - 17,24% 71M Pengembangan Pengelolaan Permuseuman
  - 12,11% 50 M Dukungan Management dan Dukungan Teknis Lainnya
  - 8,47% 35M Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional
  - 2,47% 11.3 M Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan
  - 1,55% 6.4 M Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air
  - 1,34% 5.5 M Pengembangan Geografi Sejarah
  - 1,33% 5.4 M Pengembangan Nilai Sejarah
- TOTAL: 413M**

Diagram 1 - Alokasi Anggaran untuk Program Kesenjaraan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

## FASE TRANSISI DAN MANAJEMEN BIROKRASI

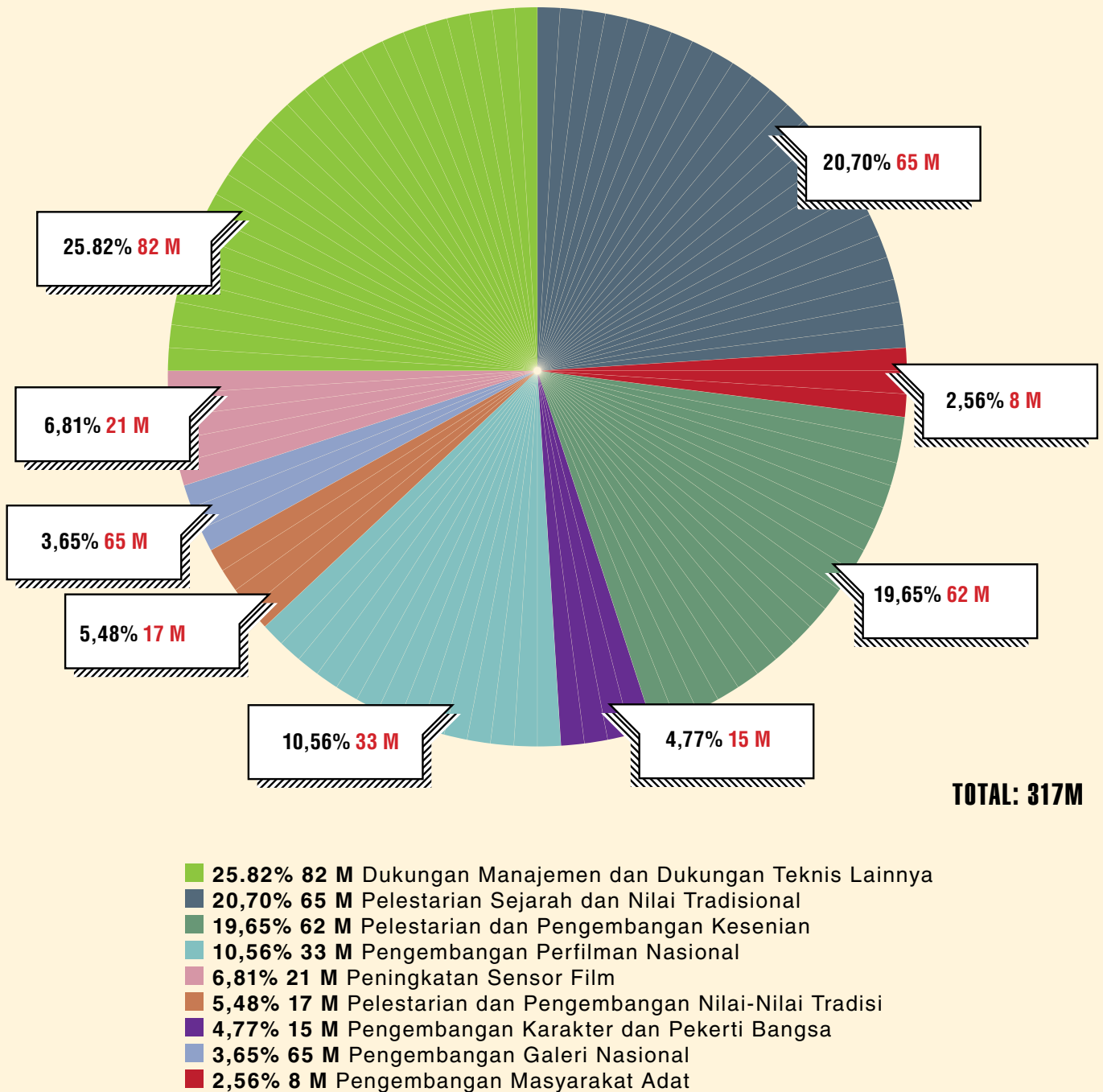


Diagram 2 - Alokasi Anggaran untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman

Periode penyelenggaraan sektor seni budaya di DIPA Kemendikbud baru kemudian berubah setelah APBN-P direalisasikan pada bulan Oktober 2013. Jumlah suntikan dana yang diterima Kemendikbud adalah Rp 12,828 T. Hal ini menandai Ditjen Kebudayaan akan mendapatkan alokasi anggaran atas perumusan DIPA APBN-P mereka senilai Rp 1,127,100,000,000. Namun kenyataannya, realisasi APBN-P untuk Ditjen Kebudayaan kembali terjerat dengan permasalahan administrasi. BPK mencatat keterlambatan Kemendikbud dalam melakukan DIPA APBN-P yang baru diterbitkan satu bulan sebelum akhir tahun anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan satker di berbagai unit Eselon I-nya. Dengan singkatnya waktu yang tersedia, beberapa satker gagal dilaksanakan. Di sisi lain, satker yang berhasil dilaksanakan harus “bekerja keras” mengejar jangka waktu kontrak yang terbatas, yakni 20 s.d 35 hari kalender, sehingga menyebabkan “realisasi yang memaksa”. Kasus ini sebagian besar terjadi pada satker PTN di Direktorat Perguruan Tinggi yang harus menuntaskan 92 kontrak hingga akhir periode 31 Desember 2012.

**PERSENTASE PENYERAPAN DITJEN  
KEBUDAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN  
2012 BERJUMLAH 57,04% DARI BESAR  
ANGGARAN RP 1,127 T  
DAN MENYISAKAN SALDO RP 488 M.  
HAL INI MEMBUAT DITJEN KEBUDAYAAN  
MENJADI UNIT ESELON I DENGAN  
PENYERAPAN ANGGARAN TERENDAH,**

diikuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (64%,34% bersaldo Rp 91 M) dan Inspektoriat Jenderal (72,86%; bersaldo Rp 50 M).

Kasus yang sama juga terjadi di Parekraf. Unit organisasi yang mengurus kebudayaan menempati penyerapan dua terendah, yakni yang pertama Ditjen Sejarah dan Purbakala dengan daya serap 74,22% atau senilai realisasi Rp 304 M dan kedua, Ditjen Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Film (85,04%; realisasi Rp 235 M). Meskipun terjadi keputusan tentang Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (EKSB) dan Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Informasi (EKMDI) yang baru aktif tahun 2013, dua ditjen baru tersebut telah mendapatkan suntikan anggaran lewat APBN-P 2012. Ditjen EKSB mendapat alokasi Rp 189.547.619.000 dari DIPA yang terbit November 2012 dan menyerap 47,2% anggaran, sedangkan Ditjen EKMDI mendapat alokasi Rp 119.650.000.000 dan menyerap 43,62% anggaran. Masing-masing direktorat merealisasikan satu satker.

Temuan-temuan di atas menggambarkan konsekuensi dari nomenklatur Kemendikbud dan Parekraf yang jatuh pada permasalahan manajemen birokrasi. Inventarisasi atau pemindahan aset memakan waktu hingga akhir tahun, dan pembagian fungsi atas direktorat lama-baru dengan laporan keuangan konsolidasi turut memunculkan kesangsian terhadap akuntabilitas anggaran selama periode 2012.

---

# POS BELANJA UNTUK PEMBINAAN NILAI DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KREATIF

---

**S**etelah setahun periode terkuras untuk menata manajemen internal, anggaran 2013 sudah mencerminkan pembagian yang jelas pada tiap unit organisasinya. Hal ini terlihat pada terbitan DIPA K/L Kemendikbud dan Parekraf yang sudah mempunyai alokasi anggaran tiap Direktorat Jenderal baru dan sejumlah satker di dalamnya.

Pada belanja pemerintah pusat untuk APBN K/L 2013, terjadi kenaikan 8,5% dari tahun 2012, yakni dari Rp 547 T menjadi Rp 594 T<sup>2)</sup>. Dari total keseluruhan belanja K/L, Kemendikbud mendapatkan alokasi 12,2% anggaran (Rp 73 T) dan Parekraf hanya mendapat 0,34% anggaran (Rp 2,053 T), turun -24,6% dari tahun sebelumnya.

---

2) "Data Pokok APBN 2007-2013", Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.254.624.997.000, yang berarti naik sebesar 10,1% dari tahun 2013. Alokasi tersebut hanyalah bernilai 1,64% jika disejajarkan dengan unit Eselon I Kemendikbud lain, berada di tingkat ketujuh dari sepuluh unit eselon yang mayoritas anggarannya didahulukan untuk sektor pendidikan.

Ditjen Kebudayaan terbagi atas lima direktorat:

1) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2) Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, 3) Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 4) Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, dan 5) Direktorat Internalisasi dan Nilai Budaya. Masing-masing direktorat mengemban sembilan program bertajuk Pelestarian Budaya.



# POS BELANJA UNTUK PEMBINAAN NILAI DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KREATIF

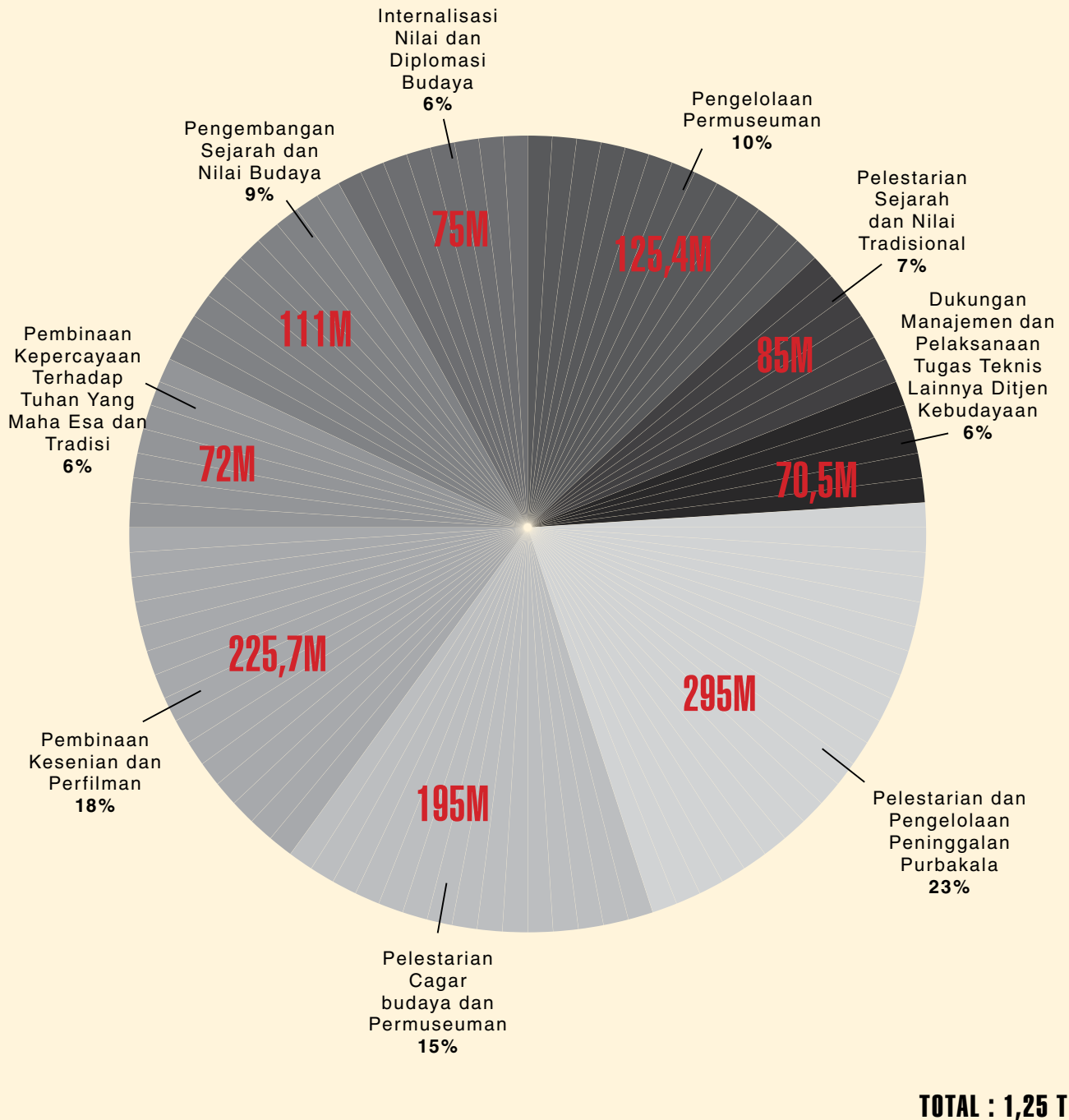


Diagram 3 - Program Pelestarian Budaya oleh Ditjen Kebudayaan

Sementara itu, Ditjen EKSB Parekraf mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 321.048.400.000, naik 69,37% dari APBN-P 2012 dan memakan 16,25% dari total APBN K/L Parekraf 2013. Sedangkan Ditjen EKMDI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 149.203.731.000, naik 24,7% dari APBN-P 2012 dan memakan 7,2% dari total APBN K/L Parekraf 2013.

Kedudukan antar kedua kementerian tersebut jika dibentangkan secara seksama akan memperlihatkan dua jalur pengembangan seni budaya, yakni pembinaan nilai di Kemendikbud dan pembangunan industri kreatif di Parekraf. Sebagai suatu keutuhan, Kemendikbud selaku “hulu” berperan menciptakan suatu sistem yang kondusif untuk menunjang dinamika kreasi mulai dari materi pendidikan, regulasi, hingga perlindungan hukum, sedangkan Parekraf selaku “hilir” membangun lingkungan infrastruktur untuk ajang promosi dan apresiasi karya.

Posisi Ditjen Kebudayaan yang berada di bawah payung Kemendikbud memungkinkannya masuk ke dalam arena institusi pendidikan, sebuah ruang yang strategis untuk pembinaan nilai-nilai kebudayaan. Namun jika melihat diagram program Pelestarian Budaya di atas, lingkup penanganan ditjen ini begitu luas.

---

**KEWENANGANNYA ATAS ASET BUDAYA SEPerti CAGAR BUDAYA, MUSEUM, DAN BENDA PURBAKALA LAIN TELAH MENYITA KOMPOSISI 48% PROGRAM KERJA, BELUM TERMASUK TUGASNYA YANG LAIN SEPerti INTERNALISASI NILAI BUDAYA, SEJARAH, DAN KETUHANAN (22%), SERTA PENGAKOMODIR KESENIAN DAN PERFILMAN (18%).**

---

Sebagai ilustrasi, kewenangan atas warisan budaya yang dapat disebut sebagai “proker utama” Kemendikbud membutuhkan tindak penanganan yang bersifat pemeliharaan, inventarisasi, dan dokumentasi terpadu. Menariknya, pos belanja untuk program warisan budaya justru terkuras ke dalam layanan perkantoran (143,75 M) yang bersaing ketat dengan pemeliharaan rutin (143,045 M). Agenda penyuluhan dalam rangka memperkenalkan warisan budaya hanya ditargetkan 6 kegiatan dalam satu tahun, jumlah yang tidak sebanding untuk mencetak hasil (*outcome*) yang simetris dari pengeluaran yang telah diusahakan.

Mayoritas keluaran (*output*) agenda internalisasi nilai budaya, sejarah, dan Ketuhanan juga masih berbentuk kegiatan penyuluhan/seminar (65,1 M) dan kegiatan pertunjukan (99,08 M), maupun kegiatan khusus untuk pencatatan warisan budaya yang bekerja sama dengan UNESCO (20,3 M). Agenda publikasi sebagai medium distribusi ilmu pengetahuan terhadap bidang ini mempunyai alokasi 5,8%, dengan anggaran publikasi (19,9 M untuk 176 dokumen dan buku) dan naskah kajian (11,2 M untuk 129 naskah) yang dipertanyakan transparansi terbitan, distribusi, dan jalur aksesnya.

Sementara itu, Parekraf yang mengemban pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif masih berjalan tertatih-tatih. Beberapa hal yang menghambat adalah pemetaan entitas produk kreatif sejumlah 15 buah yang membutuhkan keamanan infrastruktur per entitas

(arsitektur, desain, film-video-fotografi, mode, musik, kerajinan, kuliner, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni dan pertunjukan, seni rupa, teknologi informasi, dan televisi dan radio), serta sulitnya untuk tidak direduksi menjadi agenda pariwisata belaka, jika dilihat dari alokasi anggaran sektor pariwisata yang berjumlah dua kali lipat (970 M).

---

### **POS BELANJA DI PAREKRAF MAYORITAS MEMPUNYAI INDIKATOR PENGEMBANGAN BERBENTUK *INDIVIDUAL/ORGANIZATION GRANTS* MELALUI REALISASIEVENT (PAGELARAN, PAMERAN, LOMBA, FESTIVAL, DAN PENGANUGRAHAN) DAN KOMPETENSI SDM (WORKHOP DAN SEMINAR).**

---

Pada Ditjen EKSB, target pencapaian *grants* tersebut mencapai 8800 orang dan pada Ditjen EKMDI 4452 orang. Sebagai perannya untuk industri kreatif, belum tercatat agenda semacam pembangunan fisik untuk sebuah ruang kerja kreatif, namun program aktivasi Taman Budaya—yang sudah ada sejak tahun 70an dan tidak terurus—setidaknya memunculkan suatu potensi tersendiri. Program pendukung lainnya adalah perumusan kebijakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pijakan awal penyelenggaraan kesenian ke depan.

Direktorat Desain dan Arsitektur dan Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Fasilitasi Ditjen EKMDI dalam praktiknya memiliki banyak program kerja yang serupa di lingkup kesenian di kedua kementerian. Baik Direktorat Kesenian dan Perfilman di Ditjen Kebudayaan Kemendikbud maupun Ditjen EKSB dan EKMDI Parekraf mempunyai agenda pengembangan berbentuk *project grants* (Rp 57,9 M) dan Rp 84,4 M) dan revitalisasi Taman Budaya (Rp 20 M dan Rp 27,1 M).

Dilihat dari struktur organisasi tiap direktorat, koordinasi antar keduanya untuk tiap pengembangan ragam seni juga dicurigai tumpang tindih, yang kemudian berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kekuatan hukum untuk naskah kebijakan yang dirumuskan kedua belah pihak. Direktorat Kesenian dan Perfilman (Eselon II) - Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mempunyai unit turunan (Eselon III) yang terdiri atas Subdirektorat Program dan Evaluasi, Subdirektorat Seni Pertunjukkan, Subdirektorat Literasi dan Apresiasi Film, dan Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi. Sedangkan di Ditjen EKSB dan EKMD Parekraf, ragam seni telah mempunyai institusi masing-masing di tingkat Eselon II yakni Direktorat Pengembangan Industri Perfilman, Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukkan dan Seni Musik, Direktorat Pengembangan Seni Rupa, Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Direktorat Desain dan Arsitektur, dan Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi.

Paper penelitian ini berhenti pada DIPA Kemendikbud dan Parekraf 2013 karena belum terbitnya dokumen audit BPK K/L 2013 untuk membantu analisa akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Kinerja kedua kementerian yang memiliki bidang kerja beririsan ini tampak belum kompak dan berkesinambungan. Irisan antar keduanya berada di lingkup kesenian, namun cakupan tugas Kemendikbud yang begitu luas berpengaruh kepada Parekraf yang seyogyanya mendapatkan peralihan guna dari apa yang dijalankan Kemendikbud. Persoalan lain adalah

---

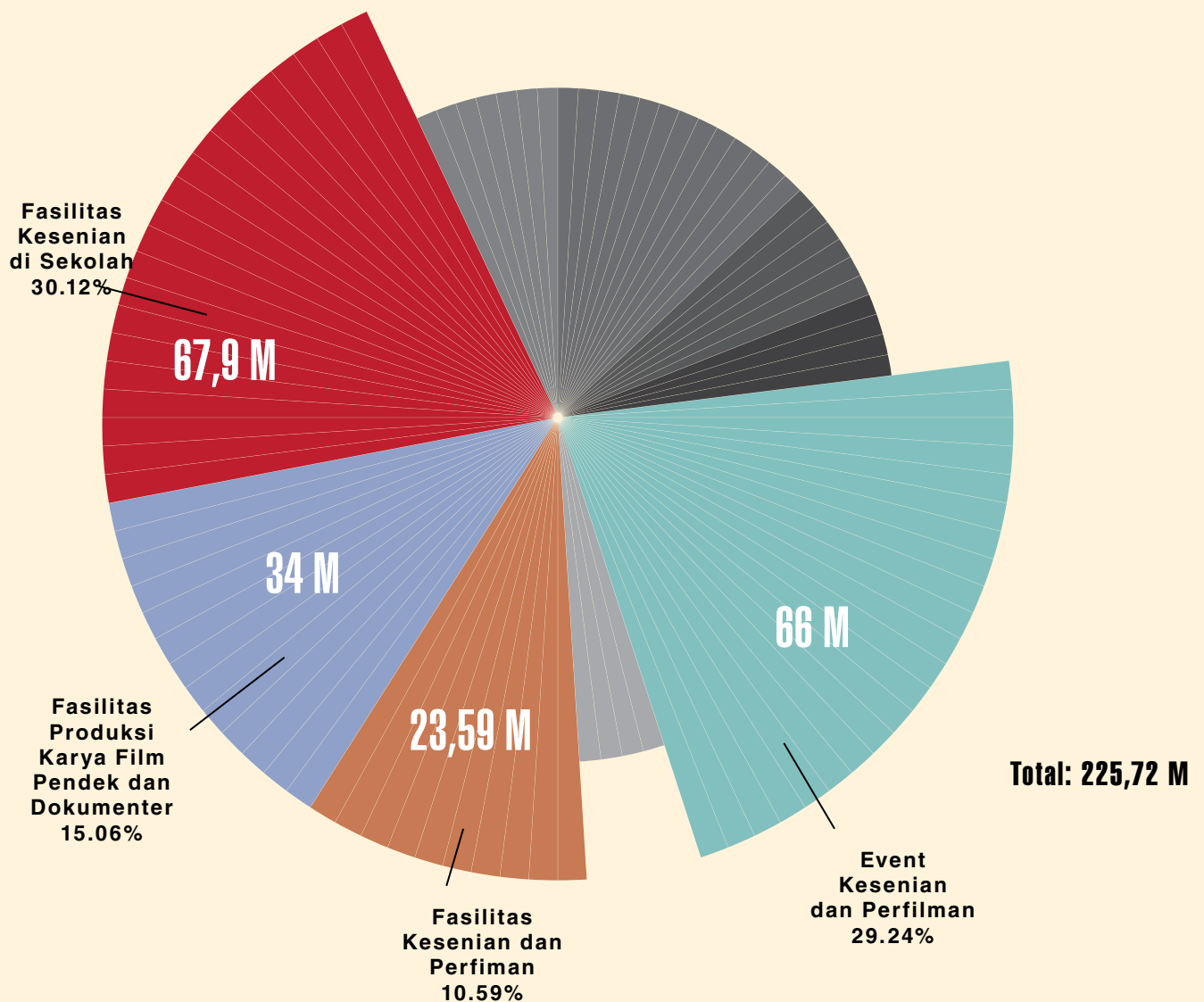
**STATUS KEDUDUKAN UNIT  
PENGELOLAAN SENI BUDAYA  
BAGAIKAN “ANAK TIRI” DARI  
PAYUNG BESAR SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN SEKTOR PARIWISATA: DITJEN  
KEBUDAYAAN MENDAPATKAN  
ALOKASI 1,64% ANGGARAN (RP 1,25 T)  
DAN DITJEN EKSB - EKMD SEBESAR  
23,45% ANGGARAN, NAMUN DENGAN  
DAYA KAPITAL YANG TIDAK BANYAK  
(RP 470,2 M).**

---

**D**ata *budget estimates* Kemendikbud dan Parekraf yang terdiri dari rencana program dan alokasi anggaran tiap direktorat dapat diperiksa dalam lampiran di bawah. Inilah agenda pemerintah dalam pengembangan sektor seni budaya kita melalui pembacaan instrumen anggaran. Sudah idealkah?

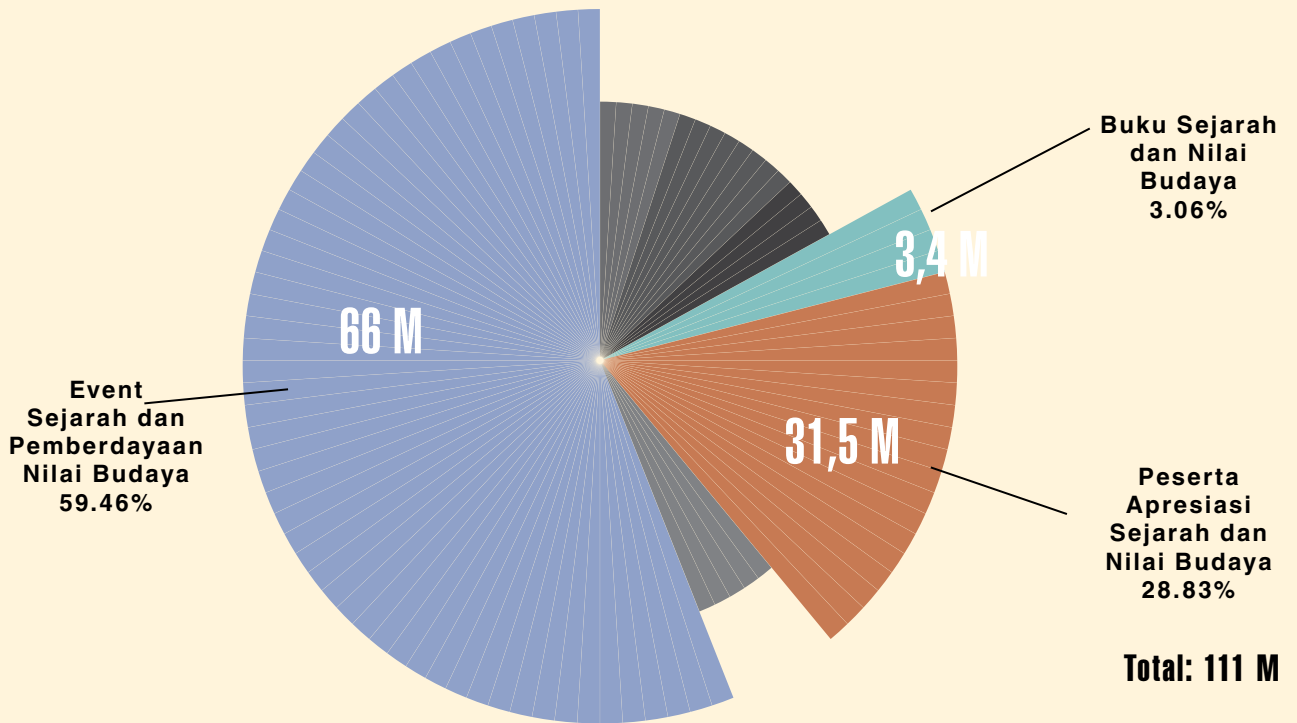
## DITJEN KEBUDAYAAN

### DIREKTORAT PENGEMBANGAN FILM DAN KESENIAN

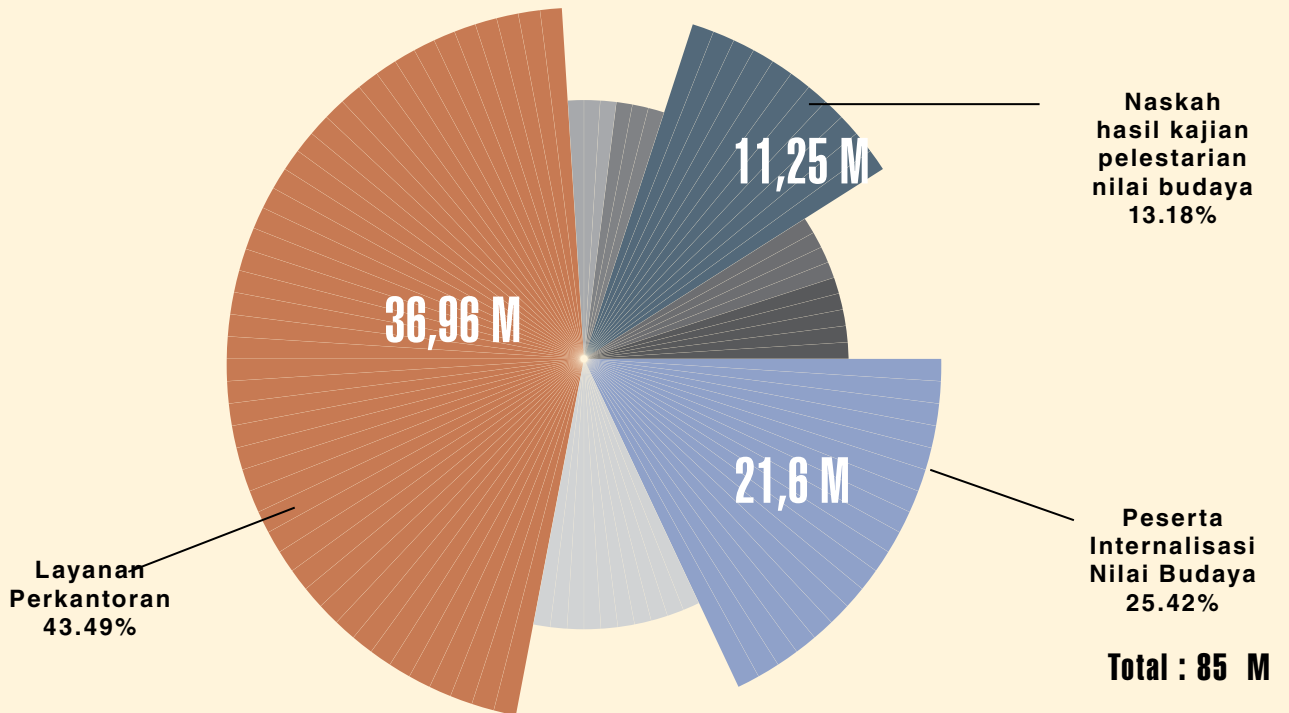




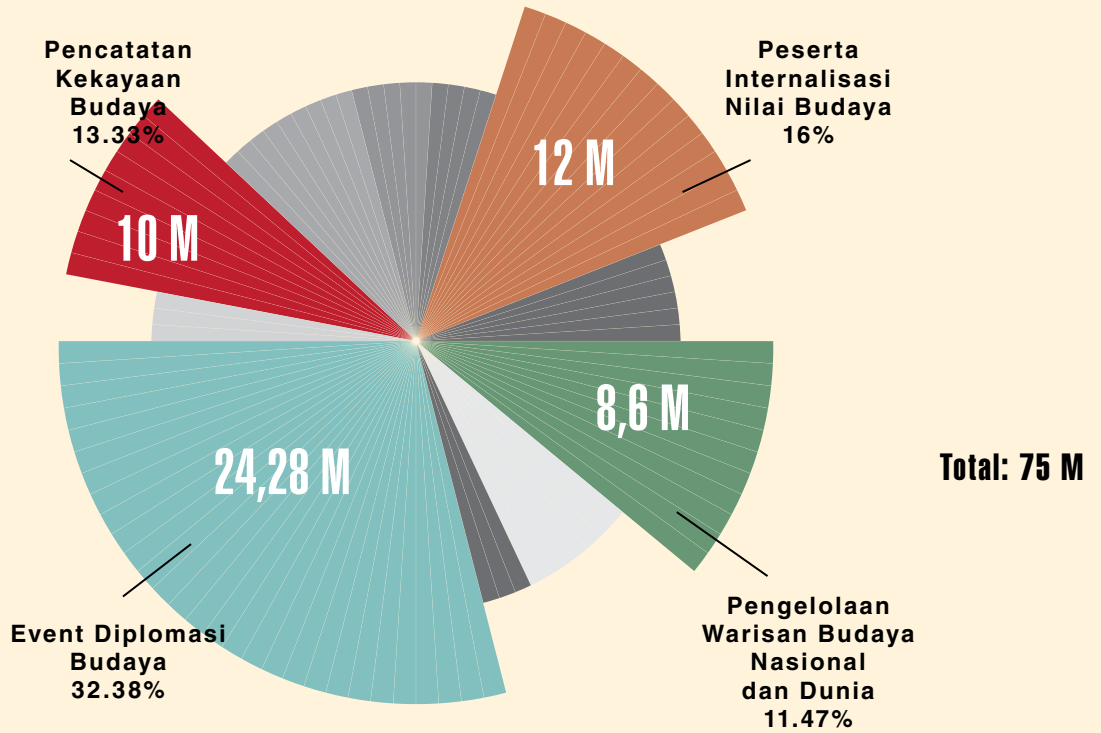
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA



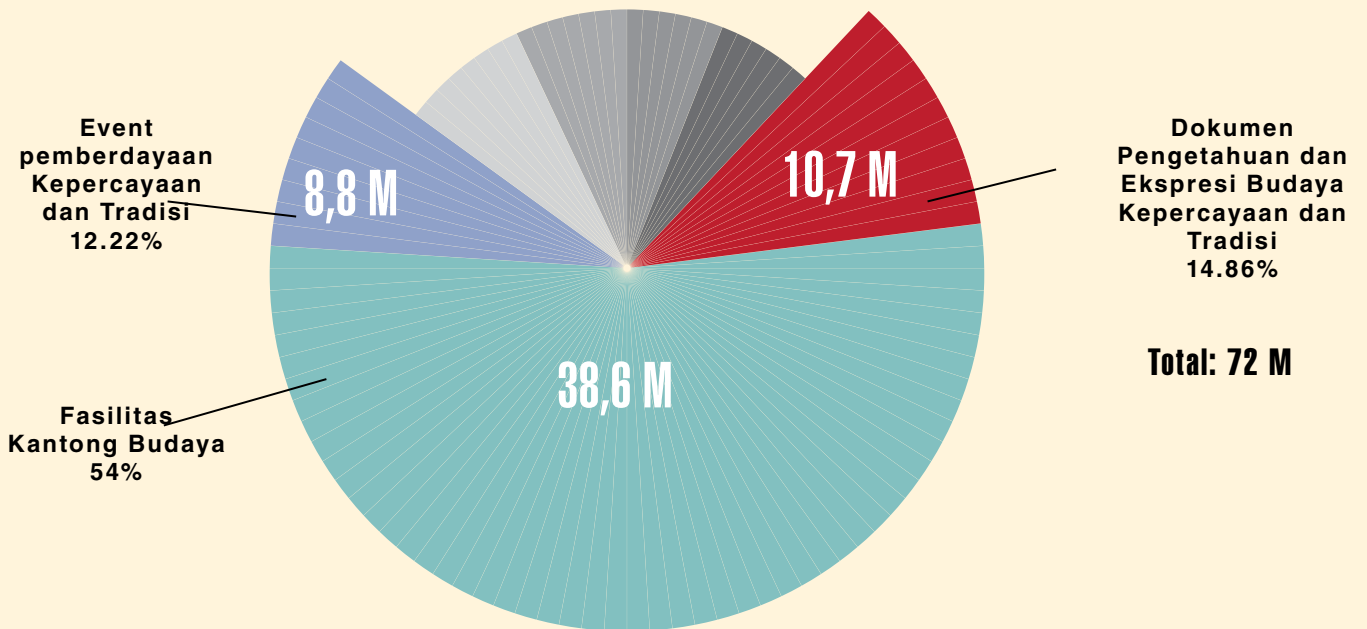
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL



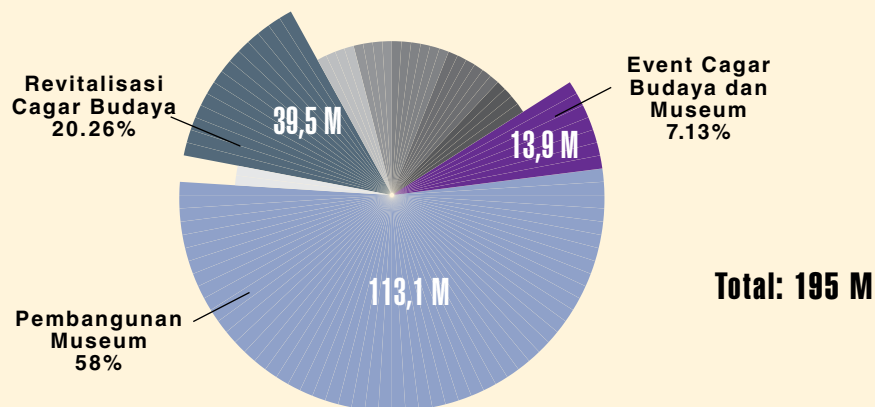
DIREKTORAT NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA



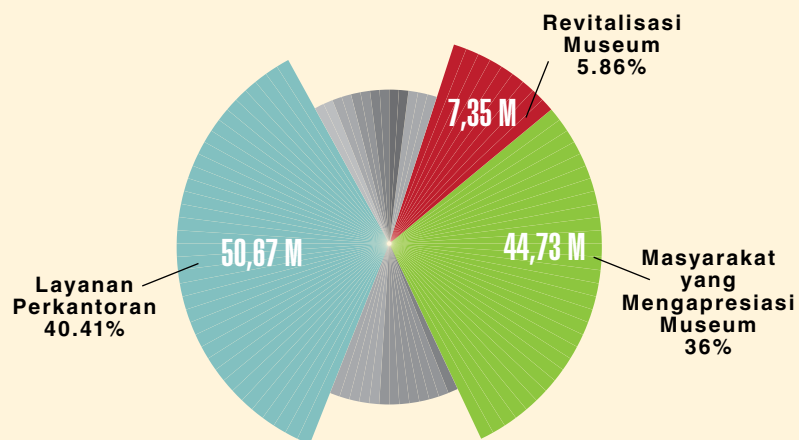
DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI



DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

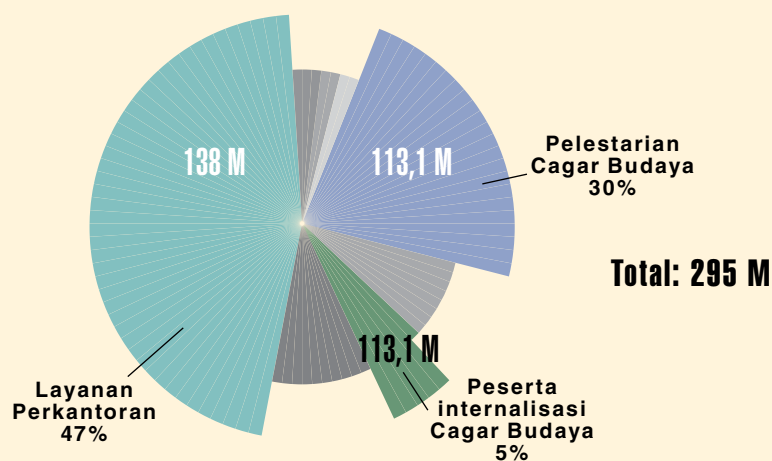


Alokasi Anggaran untuk Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman



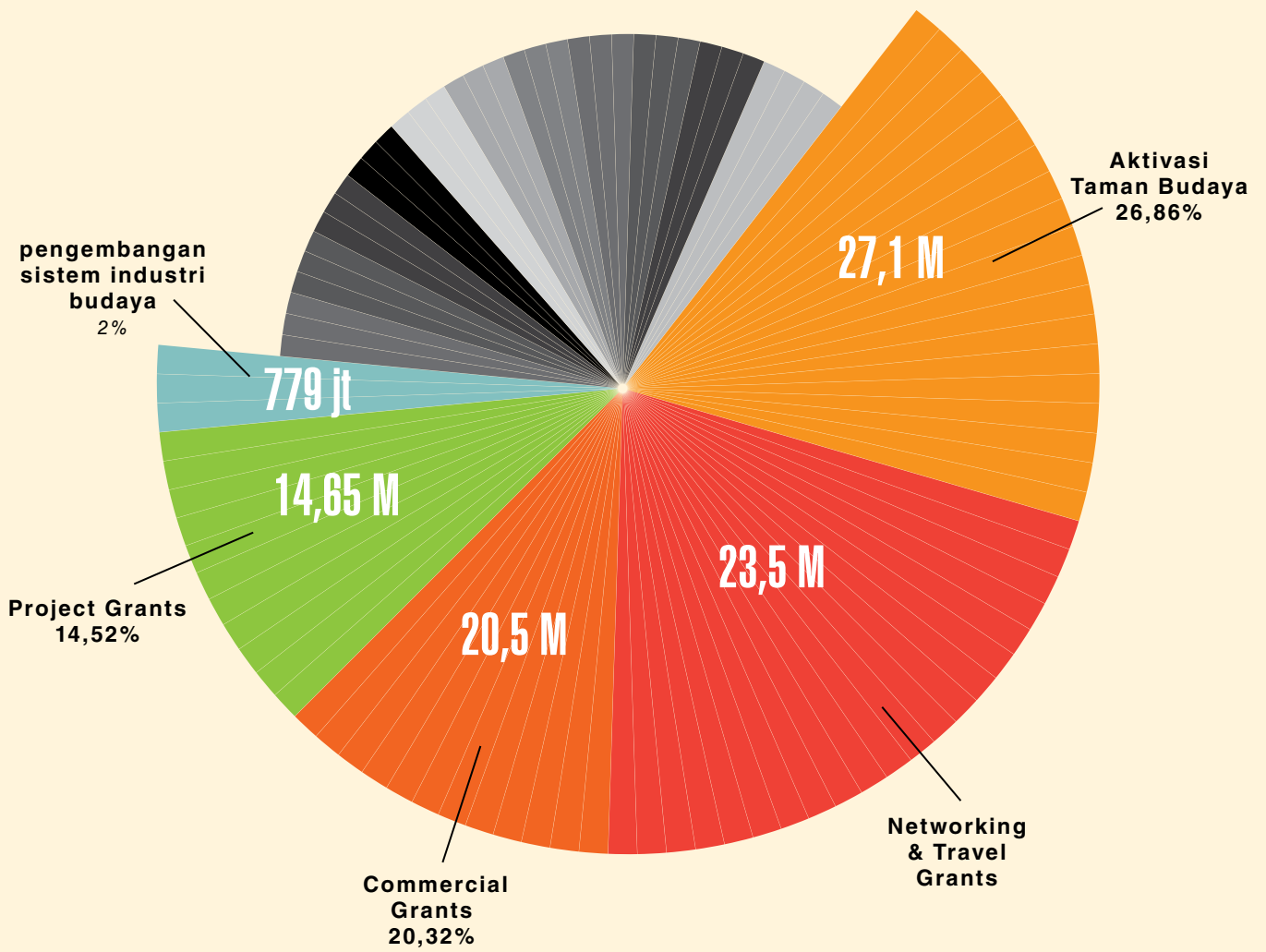
Pengelolaan Permuseuman

BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA



Alokasi Anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala

**PAREKRAF**



## SIMPULAN

**1. ARAH PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN BERSIFAT KONSERVASI DENGAN BERBAGAI AGENDA PELESTARIAN.**

**2. KETERSEDIAAN GRANT (PROJECT, COMMERCIAL, DAN NETWORKING & TRAVEL) UNTUK PELAKU SENI YANG MENCAPAI 16% TOTAL ANGGARAN ATAU +/- RP 268,22 M**

**3. PENGGANDENGAN RUANG PUBLIK SELAIN KEBERADAAN LEMBAGA SENI SWASTA MELALUI AKTIVASI TAMAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN MUSEUM**

**4. KURANGNYA PENDEKATAN OUTCOME YANG DAPAT MENJABARKAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN TERHADAP EVENT-EVENT YANG DISELENGGARAKAN**